

Wisata Hutan Kapur Delleng Degak: Strategi Pengembangan Ekowisata berbasis Masyarakat di Desa Sibagindar, Pakpak Bharat, Sumatera Utara

Rahmat Gunawan^{1*}, Sondang Hukum Parulian Manik²

¹Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan, Universitas Gadjah Mada

²Tokoh Masyarakat Lebbuh Manik Perlambuken, Pakpak Bharat Sumatera Utara

rahmad.gunawan@mail.ugm.ac.id

Abstract

'Delleng Degak' is a tourist destination in Sibagindar Village, Pakpak Bharat, North Sumatra, where a commodity forest for the camphor tree species was established in 2022. The camphor wood forest is being promoted as an ecotourism destination that is educational, historical, and scientific, in addition to its rare population. Nevertheless, the status of a forest area presents a challenge in terms of access to tourist locations, in addition to the absence of capacity and ability to manage tourist areas. The objective of this research is to ascertain the community's level of sensitivity in addressing opportunities arising from the forest area utilization agenda through tourism development initiatives. A qualitative approach method with descriptive data analysis techniques is employed in this research. The findings of this investigation indicate that the absence of community-based tourism management capabilities serves as an impediment to the advancement of ecotourism development concepts. The community is presented with new challenges as a result of the presence of camphor forests in forest areas. Consequently, forest area management initiatives are implemented in conjunction with community-based ecotourism development programs. Indirectly, the development of ecotourism that prioritizes community involvement is a critical component of the preservation of the socio-cultural and ecological values that have been passed down by their ancestors. Ultimately, this presented a dilemma for the residents of Lebbuh Marga Manik Perlambuken, Sibagindar Village, who were apprehensive about the potential loss of their ancestral heritage. Particularly in regard to the camphor forests that were previously a source of income for the community.

Keywords: Delleng Degak; Camphor Forest; Ecotourism and Strategy

Pendahuluan

Destinasi-destinasi wisata di Indonesia umumnya hanya mengikuti tren pasar ketimbang mengoptimalkan produk serta ikon lokal di lokasi wisata tersebut. Pentingnya produk dan ikon lokal ini seringkali tidak diperhatikan oleh banyak destinasi wisata yang sedang dikembangkan

secara nasional, termasuk di Sumatera Utara. Hal ini kemudian berimplikasi pada kunjungan para wisatawan yang seringkali tidak berkelanjutan atau jangka panjang. Selain itu, fokus pengembangan destinasi wisata khususnya di Sumatera Utara lebih banyak dilakukan hanya di lokasi-lokasi wisata yang sudah dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun internasional, seperti Danau Toba di Samosir, panorama alam di Penatapan Berastagi, Sidikalang dengan produk oleh-oleh khas berupa kopi berkualitas unggulan. Arah pengembangan destinasi wisata yang saat ini diterapkan oleh pemerintah daerah Sumatera Utara menunjukkan bahwa destinasi yang tidak diunggulkan berakibat tidak memperoleh porsi pengembangan wisata yang cukup, sehingga menjadi kendala dan hambatan yang dihadapi suatu daerah dalam peningkatan pengembangan sektor wisata secara signifikan.

Pengembangan dan promosi destinasi wisata alam di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera masih belum optimal. Hal ini seperti yang terjadi di salah satu destinasi wisata, yaitu Wisata Hutan Kapur di Desa Sibagindar, Kecamatan Pagindar, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah daerah Pakpak Bharat telah berupaya mendukung pengembangan wisata alam dan melakukan promosi wisata untuk mengenalkan destinasi-destinasi wisata di Pakpak Bharat ke khalayak umum. Seperti liputan yang disampaikan oleh medanposonline.com (2024) bahwa daerah dapat memperoleh manfaat dengan kehadiran promotor destinasi wisata alam dalam memperkenalkan keberadaan Pakpak Bharat secara lokal, nasional dan internasional. Dorongan pengembangan promosi wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini, dianggap masih jauh dari peningkatan yang signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan tata ruang wilayah, pemanfaatan dan pengelolaan daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang belum optimal.

Berdasarkan status kewilayahan Kabupaten Pakpak Bharat didominasi area kawasan hutan yang mencapai 132.865,08 hektar atau sekitar 87% dari total luas wilayah wilayah secara administratif (SK Kementerian Kehutanan Nomor 44/Menhut/2005). Hal inilah yang menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam upaya pengembangan potensi daerah yang hanya dapat mengelola 13% luasan wilayah secara legal. Oleh sebab itu, perlu gagasan dan trobosan baru pemerintah daerah dalam penegembangan wilayah, salah satunya dengan mengusulkan model skema-skema perizinan pengelolaan kawasan hutan sesuai regulasi. Salah satunya adalah dengan pengembangan destinasi wisata yang memanfaatkan sumber daya alam yang sudah tersedia, seperti keberadaan hutan, air terjun dan satwa-satwa langka. Seperti yang disampaikan oleh Bungin (2015) bahwa pariwisata yang kita tidak perlu membangun konstruksi ulang terkait objeknya adalah sumber daya alam dan dapat secara langsung dinikmati keindahannya.

Dari rencana pengembangan destinasi wisata alam di Kabupaten Pakpak Bharat ini, masalah yang sering muncul adalah tidak adanya inisiatif kerja-kerja kolaboratif dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan pengelola wisata di level tapak. Jadi, perlu upaya dan aksi kolaboratif serta keterlibatan berbagai pihak yang tidak hanya bertujuan merusak alam, namun berkontribusi mendorong pengembangan destinasi wisata maupun ekowisata di Kabupaten Pakpak Bharat. Sayangnya, pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat lebih memprioritaskan pengembangan

daerahnya melalui pembangunan yang bersifat fisik, karena bagian dari kebutuhan pengembangan wilayah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh. Padahal, dalam mendorong pengembangan destinasi wisata di Pakpak Bharat tidak hanya perlu melakukan perubahan fisik yang cenderung dekat merusak alam. Oleh karena itu, dalam upaya pengembangan pariwisata ini setidaknya Kabupaten Pakpak Bharat perlu menerapkan komponen-komponen 6A yang meliputi; *attraction, amenities, ancillary, activity, accessibilities and available package* (Brown & Stange, 2015; Buhalis, 2020), untuk mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan komponen-komponen 6A ini, dapat menjadi peluang baru bagi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk mendorong focus pengembangan pariwisata daerah yang berkelanjutan.

Dengan demikian, tulisan ini berusaha melihat strategi-strategi yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa hingga kelompok masyarakat dalam mendorong pengembangan wisata yang mengedepankan pelestarian dan menjaga lingkungan serta alamnya. Jadi, perlu upaya pendampingan pengelolaan wisata dan peningkatan kapasitas 'calon aktor penting' yang akan mengelola destinasi wisata alam, dalam hal ini adalah masyarakat Desa Sibagindar, sebagai upaya-upaya strategi pengembangan destinasi wisata yang potensial ini. Tujuannya adalah agar suatu wisata daerah berkembang, dikarenakan kemampuan dan kualitas sumber daya manusianya yang terlibat secara langsung pada setiap tahapan pengembangan wisata tersebut. Salah satunya inisiatif dan pelibatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang berada di Desa Sibagindar dalam pengelolaan wisata alam ini. Hal serupa juga dinyatakan oleh Resdiana dan Sari (2019) bahwa pelaku atau aktor-aktor yang terlibat sangat berperan penting dalam membangun suatu destinasi wisata yang menarik, seperti pemerintah, pihak swasta dan peran masyarakat sendiri.

Berangkat dari kendala dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Sibagindar dalam pengupayaan pengembangan wisata hutan kapur Delleng Degak diatas, fokus penelitian ini adalah melihat sejauh mana pelibatan masyarakat dalam mendorong pengembangan wisata di Desa Sibagindar, Kecamatan Pagindar, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Hal ini menjadi tantangan tersendiri tidak hanya bagi Pokdarwis yang mengelola wisata hutan kapur tersebut, akan tetapi bagi pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa dalam mendorong ketidakefektifan pengembangan suatu destinasi wisata. Berdasarkan keterbatasan kapasitas masyarakat sendiri dalam pengelolaan wisata alam yang berbasis masyarakat ini, lalu bagaimana strategi pihak-pihak yang terlibat, baik pemerintah daerah, kecamatan, desa dalam meningkatkan ketidakefektifan peran masyarakat dalam pengembangan wisata alam hutan kapur di Desa Sibagindar?

Metode

Perlu Penelitian ini dilakukan pada periode Januari sampai Agustus 2023 di Desa Sibagindar, Kecamatan Pagindar, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Metode pendekatan kualitatif

digunakan dalam proses pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menemukan keterkaitan antara satu faktor penyebab dengan situasi yang terjadi hingga saat ini. Sebagai suatu cara memperoleh data dari penelitian, metode kualitatif yang digunakan merupakan suatu istilah yang diperuntukan dalam mengaitkan temuan-temuan kunci dalam sebuah studi, terutama merujuk pada pendekatan naratif, fenomenologi, penelitian aksi, studi kasus, etnografi, penelitian historis dan analisis konten (Creswell, 2009; Hancock dkk, 2009). Jadi, hasil dari rangkuman tahapan-tahapan metode yang runtut dan detail dapat menyajikan data hasil penelitian yang holistik serta tersampaikan secara deskriptif. Jadi, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi-partisipatif, wawancara terhadap beberapa tokoh dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan wisata serta mengaitkan kajian literatur yang relevan pada hasil-hasil riset sebelumnya. Penentuan informan atau narasumber dilakukan dengan mewawancarai aktor yang menginisiasi pengembangan wisata Hutan Kapur di Desa Sibagindar, seperti Pemerintah Desa Sibagindar, Tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan pokdarwis dan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Model penelitian ini berusaha menggunakan prinsip-prinsip kunci dengan desain penelitian seperti menghubungkan pertanyaan penelitian dengan pendekatan atau metodologi. Yakni, mempertimbangkan analisis isu dan relevansi data-data temuan yang terintegrasi sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan (Hamidah, 2019). Analisis *framework* secara kontekstual yang berkaitan dengan studi pariwisata membantu mendeskripsikan data-data temuan penelitian yang dikembangkan dengan melihat konteks kebutuhan pengembangan wisata yang dimaksud, seperti yang dilakukan pada wisata Hutan Kapur di Desa Sibagindar ini. Dari data-data temuan dan analisis yang dilakukan secara komprehensif, *Community Action Plan* (CAP) adalah wujud dari target capaian pengelola wisata (Hudayana dkk, 2019) setelah hadirnya inisiasi pengembangan wisata Hutan Kapur Delleng Degak di Desa Sibagindar. Jadi, keterlibatan setiap peran pihak-pihak terkait yang mendorong pengembangan suatu wisata sebagai aksi kolaboratif yang disusun dengan perencanaan bersama. Dengan begitu, perlu dilakukan identifikasi dan pemetaan potensi-potensi desa yang belum terakomodir dalam pengupayaan pengembangan wisata berbasis masyarakat secara partisipatoris. Tujuannya, agar dapat menjadi suatu kajian yang berdasarkan riset yang dapat diadopsi oleh lokasi pengembangan wisata berbasis masyarakat lainnya di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pengembangan destinasi wisata Hutan Kapur di Desa Sibagindar dianggap masih belum optimal, karena keterbatasan kapasitas dan kemampuan para pengelola wisata dalam upaya mendorong pengembangan suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang sama antara setiap pihak-pihak terkait dalam merumuskan pendekatan dan konsep destinasi wisata yang dikembangkan di suatu lokasi yang potensial. Hal ini akan berpengaruh pada ketersediaan informasi, akses dan fasilitas yang akan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan sebagai tempat wisata, terutama pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Jadi, peran serta masyarakat

dalam mendukung pengembangan wisata ini sangat begitu penting, karena masyarakat akan menjadi aktor atau pelaku utama yang mendorong dan menghadirkan alam dalam bentuk destinasi wisata yang mendidik, aman, ramah lingkungan dan aksesibel. Dengan begitu, keterlibatan masyarakat dalam mendorong suatu destinasi wisata harus dibekali dengan kemampuan dan pengetahuan mengenai pengembangan wisata, sehingga memperoleh pemahaman bagaimana sebenarnya tujuan dari ide pengembangan destinasi wisata yang berbasis masyarakat tersebut (Kurniawan, 2020).

Keterbatasan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia ini yang menjadi permasalahan secara umum, terutama kaitannya dengan pengembangan wisata di Kabupaten Pakpak Bharat. Beberapa ide pengembangan destinasi wisata yang didorong menjadi ikon daerah, malah redup dengan sendirinya karena tidak didukung oleh kapasitas peran-serta masyarakat sendiri. Pemahaman masyarakat yang belum mengerti secara konteks dan peluang dari dampak pengembangan sektor wisata, dianggap masih belum menjadi fokus utama untuk perlibatannya. Oleh karena itu, hadirnya peran-serta pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah sangat diperlukan, seperti mendorong peningkatan kapasitas pengelola wisata, sistem manajemen wisata dan upaya promosi wisatanya sendiri. Pada studi kasus penelitian ini, salah satunya terdapat pada destinasi Wisata Hutan Kapur Delleng Degak Desa Sibagindar, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara.

'Delleng Degak' sebagai Wisata Hutan Kapur Desa Sibagindar

Pondasi Pada bagian ini, akan membahas terkait dengan awal mula inisiatif terkait dengan lokasi pengembangan wisatanya. Secara historis, penamaan Wisata Hutan Kapur Delleng Degak sendiri berangkat dari sebuah fenomena cerita rakyat masyarakat Lebuh Manik Perlambuken, yaitu dari tempat yang diberi gelar *Nipe Delleng Degak*. *Nipe Delleng Degak* sendiri memiliki arti sebagai tempat berdiamnya seekor ular raksasa dengan posisi mulut terbuka menganga (yang terlihat seperti liang atau goa) dengan tujuan untuk memperoleh mangsa yang berlindung ketika sedang hujan atau kabur dari kejaran pemangsanya. Posisi mulut ular raksasa yang terbuka itu, dipercaya oleh masyarakat Desa Sibagindar karena dulunya pernah terdapat seseorang yang masuk ke dalam liang atau gua untuk berteduh dan beristirahat ketika berburu ke hutan. Dengan menegakkan sebuah kayu runcing yang digunakan sebagai alat berburu di bagian pintu goa, dan ketika dilepas dari lorong goa tersebut ternyata kayu penyanggah tersebut sudah berlumuran darah. Jadi, akhirnya disadari oleh pemburu tersebut bahwa tempat yang dianggap goa itu merupakan mulut ular raksasa yang sedang menunggu mangsa masuk dalam perangkapnya tersebut.



Gambar 1. Lokasi Delleng Degak Wisata Hutan Kapur Desa Sibagindar

(Sumber: Data Penelitian, Februari 2023)

Oleh karena itu, dengan cerita legenda yang dipercayai oleh masyarakat Desa Sibagindar tersebut menjadi asal-muasal penamaan tempat lokasi wisata Hutan Kapur untuk menarik perhatian wisatawan berkunjung ke Wisata Delleng Degak tersebut. Menariknya keberadaan ekowisata Hutan Kapur Delleng Degak tersebut ditandai dengan keberadaan dan kekayaan potensi sumber daya alam yang dimiliki, cerita rakyat, populasi jenis tanaman hutan kapur dan beragamnya satwa kunci di hutan Sumatera yang masih terjaga, seperti Harimau Sumatera dan Orangutan Sumatera sebagai satwa yang langka serta dilindungi. Inisiatif pengembangan ekowisata hutan kapur ini muncul pada pertengahan tahun 2021, karena terdapat temuan populasi satwa penting yang sering melintas dan hasil penelitian terkait dengan kapur yang ternyata merupakan jenis tanaman purba yang sudah langka ditemui di daerah lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, muncul inisiatif masyarakat Desa Sibagindar untuk menjaga warisan peninggalan leluhur mereka yang berada dalam tanah adat ulayat Marga Manik Perlambuken di Desa Sibagindar.

Pemanfaatan sebelumnya terhadap keberadaan hutan kapur ini hanya sebatas dimanfaatkan untuk kebutuhan pengobatan tradisional saja. Yakni, berupa getah atau *ombil* (minyak dan serbuk yang menjadi bahan dasar kapur barus) yang bersumber dari hasil penderesan pohon kapur tersebut. Jadi, manfaat *ombil* sendiri digunakan oleh mereka untuk mengobati masuk angin, demam, gejala flu dan batuk, hingga menjadi pewangi alami serta pengawet suatu benda agar dapat bertahan lama. Namun, karena terdapat peluang pemanfaatan jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dapat dimanfaatkan, terjadilah pergeseran pemanfaatan sebagai sumber penunjang ekonomi. Permintaan yang tinggi dari pasar yang mengetahui manfaat dari *ombil* tersebut, maka terjadi pergeseran pemahaman masyarakat untuk melindungi hutan warisan leluhur mereka. Hal inilah yang turut dibenarkan oleh Genthong (2009) bahwa terjadi pergeseran makna kepemilikan warisan leluhur mereka yang menjadi peluang baru yang dapat menjadi peluang sumber ekonomi mereka. Jadi, karena semakin langka dan berkurangnya hasil *ombil* dan kekhawatiran kehilangan

warisan leluhur mereka, sehingga perlu menjaga keberadaan hasil alam hutan agar tidak punah. Maka dari itu, inisiasi pembentukan ekowisata berbasis masyarakat dilakukan dengan dukungan pemerintah daerah dalam menjaga serta melestarikan keberadaan hutan kapur di Desa Sibagindar tersebut.

Situasi kekhawatiran yang dialami oleh masyarakat Desa Sibagindar terkait keberadaan hutan kapur tersebut, akhirnya menyadarkan mereka sendiri untuk tetap menjaga dan melestarikannya. Namun, karena kurang optimalnya pemahaman masyarakat dalam menjaga hutannya, sehingga menjadi dampak yang merugikan bagi mereka sendiri dalam memanfaatkan hutannya. Dapat dikatakan hal ini diakibatkan karena terjadinya perubahan dan pergeseran atas hadirnya kebutuhan baru yang disebabkan oleh pengembangan suatu daerah, yaitu menjadi sumber kebutuhan ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh Samosir, dkk (2023) bahwa akan muncul dampak-dampak pergeseran baru yang diakibatkan oleh proses pengembangan suatu daerah, tak terkecuali pada keberadaan warisan leluhur yang mereka miliki saat ini. Serupa dengan apa yang dikhawatirkan oleh Pemerintah Desa Sibagindar, bahwa penentuan lokasi wisata hutan kapur sendiri. Dimana, wisata yang diusung hanya akan berangkat dari tren pasar (peluang ekonomi) saja, bukan bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan alam dan cerita leluhur mereka sebagai daya tarik suatu destinasi wisata.

Oleh karena itu, perlu langkah-langkah strategis yang dilakukan, seperti mengundang para praktisi, ilmuwan, akademisi untuk melakukan kajian secara komprehensif untuk dapat mengenalkan potensi yang berada di dalam wisata hutan kapur maupun sumber hasil potensial lainnya dengan melibatkan masyarakat di Desa Sibagindar secara langsung. Dengan demikian, berangkat dari kajian yang perlahan mulai dilakukan oleh masyarakat dengan memetakan potensi yang terdapat pada wilayah hutan kapur dalam wilayah Desa Sibagindar. Berikut adalah keterangan hasil wawancara dengan salah satu Pemerintah Desa Sibagindar yang mengutarakan awal mula mendorong wisata hutan kapur tersebut:

“Sebelumnya kami sendiri juga bingung kalau ditanya, apa potensi desa yang bisa kami dorong dengan keadaan desa di tengah rambah (hutan) seperti ini? Karena, dari hasil olahan kebun kami punya sereh (yang diolah menjadi Minyak Sereh), terus ada banyak Ikan Batang Lae (Ikan Jurung air tawar) sama Ombil (minyak dari Pohon Kapur/Kamper) yang masing-masing dari potensi itu punya manfaat yang orang-orang Pakpak sudah tau semua. Dari situlah kami mulai kepikiran kalau hasil-hasil dari alam punya peluang untuk dikembangkan, salah satunya mengenalkan hutan kapur yang ada di desa kita. Makanya, dengan mengenalkan jenis pohon purba yang masih ada sampai sekarang ini, kita juga bisa sambal mewariskan tentang kaitannya pohon penting itu ke anak-cucuk kita, biar gak lupa kalau orang tua mereka hidup sampai sekarang karena ada peran penting rambah (hutan kapur) itu.” (Wawancara dengan Sondang Manik, Maret 2023).

Dari kutipan tersebut diketahui bahwa pemahaman terkait dengan potensi yang berada di wilayah hutan kapur tidak hanya ditujukan untuk mengetahui pengembangan model wisata alam yang

tepat, namun juga merupakan cara untuk mengingat darimana masyarakat Desa Sibagindar berasal. Melalui pengembangan ekowisata ini, diharapkan keberadaan hutan kapur dapat tetap lestari. Seperti yang disampaikan oleh Buckley (2011), dimana selain menghargai peninggalan leluhur mereka juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkannya kepada khalayak umum, bahwa masih ditemui dan terjaganya cerita rakyat atau mitos yang melekat pada suatu tempat yang dikembangkan menjadi lokasi wisata. Hal ini menjadi tujuan penting bagi masyarakat desa dalam memperkenalkan kekayaan alam yang dimilikinya kepada publik, sembari melakukan pelestarian alam secara berkelanjutan, yaitu dengan menjaga keberadaan hutan disekitar desa mereka.

Dari Kawasan Hutan menjadi Destinasi Wisata

Jika ditelisik lebih jauh, keberadaan hutan jenis kayu kapur sendiri menjadi ekosistem yang eksklusif, karena keterbatasan alam dan tata ruang wilayah yang masih terjaga. Kayu kapur merupakan jenis kayu yang sering diperdagangkan (sejenis meranti besar) dimana dapat menghasilkan produk khas non-kayu, berupa kristal (kapur atau kamper) serta minyak kapur (dalam istilah Pakpak disebut ombil). Tanaman bernama ilmiah *Dryobalanops Aromatica Gaertn* ini tumbuh di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan sebagian wilayah Malaysia (Kostermans, 1988). Jadi, atas kelangkaan ekologi yang tersedia oleh alam seperti ini, perlu kesadaran dari masyarakat untuk melakukan pemanfaatan dari potensi-potensi yang dapat dikembangkan. Seperti yang disampaikan oleh Kartodirdjo (2000), dimana pelestarian tanaman sejenis kayu penghasil kapur/kamper ini dan memperkenalkan pentingnya keberlanjutan ekologi hutan serta sumber daya alam (SDA) yang masih ditemui populasi tanaman kayu kapur sebagai penyeimbang ekosistem alam dan manusia.



Gambar 2. Atraksi Penderes Pohon Kapur di Wisata Hutan Kapur Delleng Degak, Desa Sibagindar

(Sumber: Diskominfo Kabupaten Pakpak Bharat, 02 Juli 2022)

Kawasan hutan negara menjadi salah satu penyebab keterbatasan gerak masyarakat dalam melakukan aktivitas yang langsung bersentuhan dengan area hutan. Hal ini tentunya membuka peluang bagi pemerintah daerah atau yang mempunyai wewenang atas pengelolaan kawasan hutan, untuk pengusulan merubah status lahan kawasan hutan, yang awalnya tidak diperbolehkan untuk diakses menjadi berizin. Oleh karena itu, pemerintah Desa Sibagindar dalam hal ini didorong oleh KPH (Kesatuan Pengelola Hutan) Wilayah XIV Sidikalang untuk berkolaborasi dan mengusulkan izin mengakses hutan dengan skema Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial sendiri merupakan suatu sistem pengelolaan hutan secara lestari yang harus memuat izin pengelolaan hak akses secara legal dalam kacamata hukum, sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memfasilitasi pengusulan skema akses hutan dengan model Perhutanan Sosial seperti ini. Terdapat 5 (lima) skema yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016, diantaranya: Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Adat (HA), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan skema Kemitraan.

Desa Sibagindar difasilitasi oleh KPH Wilayah XIV Sidikalang, untuk mengusulkan perizinan dengan skema Hutan Desa (HD). Hal ini tentunya bukan hasil keputusan sepihak dalam menentukan skema Hutan Desa yang akan diterapkan, akan tetapi karena sebelumnya masyarakat sudah mengidentifikasi, mengamati dan mencermati potensi yang berada di dalam sekitar hutan kapur Desa Sibagindar tersebut. Hasil dari pemetaan lapangan (*grown-check mapping*) secara langsung inilah yang akhirnya mendasari mengapa usulan skema yang diajukan adalah Hutan Desa. Tujuan tak kalah pentingnya adalah, skema Hutan Desa ini dapat menjadi peluang baru bagi masyarakat secara langsung, karena masyarakat desa sendiri akan menjadi pelaku pengusahaan kegiatan yang akan diterapkan untuk mengelola izin Hutan Desa. Jadi, dengan adanya izin skema Hutan Desa berdurasi 35 Tahun, perlu ada unit kerja yang akan membidangi sektor pengelolaan hutan desa, yaitu dengan pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sesuai amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia.



Gambar 3. Penanaman Bibit Pohon Kapur, Kunjungan Rombongan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

(Sumber: Data Penelitian, Februari 2023)

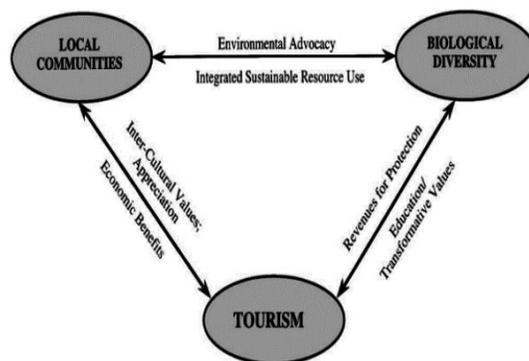
Keberadaan potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa Sibagindar secara wilayah administratif, pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang didorong oleh KPH XIV Sidikalang, menjadi peluang bagi masyarakat desa untuk tetap menjaga hutan mereka. Jadi, dengan dimilikinya izin pengelolaan Hutan Desa oleh masyarakat Desa Sibagindar, maka salah satu desain dari *Community Action Plan (CAP)* yang dirancang adalah pengembangan ekowisata hutan kapur dan panorama keindahan hutan yang masih alami. Seperti yang terlihat diatas, daya tarik yang ditawarkan dari Wisata Hutan Kapur Delleng Degak, selain ribuan tegakan kayu kapur/kamper juga terdapat sumber mata air yang mengalir membentuk air terjun atau *sampuran* dalam bahasa Pakpak. Hal lainnya yang dapat dikembangkan menjadi keunggulan dan menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung, diantaranya seperti; penanaman bibit kayu kapur sebagai upaya pelestarian alam, atraksi wisata semacam praktik penderesan pohon kapur, kearifan lokal dan budaya masyarakat Ulayat/Lebbuh Marga Manik Perlambuken. Selain itu, penyajian produk-produk makanan tradisional olahan masyarakat lokal, serta keberadaan satwa hutan yang sering melintas secara liar atau alami ketika sedang berada menikmati keindahan alam di sekitar Hutan Kapur Delleng Degak, Desa Sibagindar.

Inisiatif pengembangan ekowisata hutan kapur di Desa Sibagindar sendiri, merupakan bagian untuk menghargai alam yang menjadi salah satu sumber penghidupan dan masih terjaga saat ini. Oleh karenanya, masalah yang menjadi kekhawatiran masyarakat Desa Sibagindar dalam melihat potensi degradasi dan kehilangan hutan mereka ditengah maraknya perambahan hutan di Pakpak Bharat. Jadi, perlu dukungan dan kolaborasi yang berkelanjutan sebagai upaya dan strategi aksi untuk mempertahankan keberadaan hutan yang dibungkus dalam skema hutan desa. Pengelolaan hutan yang jumlah populasi jenis pohon kapur/kamper di Indonesia sudah cukup langka, sehingga upaya penyelamatan dan pelestarian hutan kapur ini menjadi motivasi utama masyarakat desa dan pemerintah daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Dengan demikian, perlu ide gagasan-gagasan tentang pelestarian jenis tanaman hutan dan pemikiran mengarah ke ranah konservasi hutan. Jadi, upaya perlindungan dan konservasi hutan serta satwanya menjadi langkah yang ideal dalam pelibatan masyarakat desa secara langsung.

Strategi Pengembangan Ekowisata berbasis Masyarakat

Dalam upaya inisiatif pengembangan suatu wilayah yang berfokus pada destinasi wisata, hal yang sangat penting perlu kita pikirkan adalah langkah strategi yang perlu dilakukan. Dengan kesadaran atas potensi sumber daya alam yang tersedia dan telah diwariskan oleh leluhur mereka, keberadaan hutan kapur menjadi sumber harapan hidup baru dalam mendukung taraf hidup masyarakat Desa Sibagindar. Jadi, bukan semata-mata upaya mengembangkan destinasi wisata ini adalah untuk memperbaiki kebutuhan ekonomi saja, akan tetapi memberikan kesempatan pada masyarakat dalam menyerap pengalaman dan peluang baru. Ide pengembangan ekowisata alam berbasis masyarakat muncul karena keberadaan hutan yang mereka miliki ternyata dapat dimanfaatkan, namun dengan syarat pengelolaan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, perlu upaya-perlu yang harus dipahami masyarakat untuk menginisiasi pengembangan ekowisata hutan atau alam yang berbasis masyarakat tersebut. Konsep dan paradigma pengembangan suatu ekowisata atau wisata alam yang berbasis masyarakat, setidaknya meliputi beberapa pemahaman dan peluang penting yang dapat dikuatkan. Sejalan dari apa yang disampaikan oleh Purnamasari (2011), dimana tujuan dari pengembangan pariwisata di negara berkembang bukanlah sebatas segmen ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal saja, akan tetapi lebih berkaitan dengan cara pola berpikir yang menghasilkan perubahan. Ketersediaan sumber daya (manusia, materil dan alam), nilai konservasi dan perlindungan alam, ide-ide penguatan kapasitas melalui pendampingan, nilai-nilai dan pengetahuan kultural lokal yang terjaga serta memfasilitasi suatu wisata yang berkelanjutan merupakan upaya penyajian destinasi wisata yang diharapkan hadir pembagian peran dalam menguatkan ide pariwisata itu sendiri (Ross & Wall, 1999).



Gambar 4. Arah dan Konsep Paradigma Pariwisata dan Ekowisata
(Sumber: Ross & Wall, 1999)

Model skema seperti alur gambar/bagan diatas, mencoba menjelaskan keterkaitannya dengan arah pengembangan ekowisata alam berbasis masyarakat. Jadi, saling berkaitan antara peran masyarakat sebagai *local communities* dengan keberadaan sumber daya alam yang tersedia di hutan (*biological diversity*). Oleh karena itu, perlu aksi kolaborasi antar setiap pihak yang saling mendukung pemanfaatan hutan sebagai upaya inisiatif ekowisata Hutan Kapur di Pakpak Bharat. Konsep *Triple Helix* merupakan aksi kolaborasi yang memadukan peran aktor atau pelaku yang berusaha membangun serta mengembangkan destinasi wisata secara bersama (Resdiana & Sari, 2019). Aktor-aktor atau para pelaku yang terlibat dalam upaya mendukung berkembangnya suatu objek destinasi wisata, turut andil peran pemerintah, pihak swasta dan peran serta masyarakat, sehingga menghasilkan kolaborasi atas ide-ide prioritas dari pengembangan wisata yang akan ditawarkan.

Namun, perlu kesepakatan pembatasan ruang andil yang jelas dalam peran dan aksi pengembangan ekowisata yang dilakukan. Jadi, hak dan kewajiban setiap aktor/pelaku yang berkontribusi dalam pengembangan objek destinasi wisata tidak hanya diakui satu pihak saja. Dengan begitu, perlu memetakan potensi yang berdampak baik serta dampak yang berpotensi

mengganggu dinamika pengembangan wisata yang tengah dibangun bersama. Persis informasi ini juga turut diperoleh ketika berada di lokasi penelitian, yaitu salah satu masyarakat desa yang juga terlibat sebagai tokoh masyarakat pengembangan wisata hutan kapur Desa Sibagindar, bahwa;

“Untuk pengembangan wisata kapur Delleng Degak sendiri, tidak mungkin kami mampu membuatnya hanya dari desa saja, tapi juga harus ada dukungan dari pemerintah daerah (Kabupaten Pakpak Bharat). Dukungan ini bukan hanya sebatas bantuan dana, tapi juga dukungan fasilitas jalan (akses) menuju ke desa dan ide-ide yang bagus bagaimana untuk mengembangkan tempat wisata kita agar bisa dikenal oleh orang diluar Pakpak Bharat. Makanya, kita sama-sama saling mendukung program pemerintah, kami (masyarakat desa) membantu mendukung pengembangan daerah lewat wisata yang berada di desa, pemerintah (daerah/kabupaten) juga mendukung kami dengan menyediakan infrastruktur jalan memadai.” (Wawancara dengan Uluk Manik, Juni 2023).

Jadi, diperlukan oleh desa sendiri dalam mendorong berkembangnya destinasi wisata selain saling adanya dukungan tersebut adalah rencana strategi terkait apa yang akan dilakukan saat ini maupun kedepannya. Upaya membangun ide skenario dari rencana strategis pengembangan wisata ini yang harus didampingi, sehingga terukur serta teruji dari apa yang akan dilakukan terkait dengan mendorong pengembangan wisata hutan kapur tersebut. Oleh sebab itu, keterlibatan peran dari setiap elemen untuk mendorong pengembangan wisata seperti ini, perlu kolaborasi yang baik ketika memulai perencanaan dan merencanakan strategi pengembangan destinasi wisata kayu kapur ini. Terlebih model strategi *triple helix* seperti ini, juga tidak asing kita perhatikan dilakukan oleh setiap daerah sebagai strategi mendorong kesadaran atas potensi daerah yang perlu dikembangkan kedepannya.

Pertama, peran dari pemerintah sebagai sebuah institusi yang akan mendukung secara program dan pendanaan. Peran pemerintah dalam mendorong kesadaran dan pengembangan potensi daerah menjadi suatu kewajiban sebagai fasilitator yang harus hadir, terutama dalam melakukan inisiasi model strategi pengembangan wisata seperti apa yang dapat menarik perhatian para wisatawan yang akan berkunjung. Jadi, respon dari pemerintah kabupaten dan desa begitu sangat antusias atas ide pengembangan ekowisata tersebut, karena menjadi unsur yang memiliki dampak penting terkait dengan pengenalan potensi daerah yang terdapat didalamnya. Kemudian, strategi untuk melakukan negosiasi secara pemerintahan atau kelembagaan juga dapat dilakukan oleh pemerintah, seperti negosiasi politis atas penyertaan program pengembangan destinasi wisata yang diarahkan kepada pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama dalam subjek destinasi wisata yang akan dikembangkan.

Kedua, peran yang paling pokok adalah keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan suatu destinasi wisata. Model perencanaan dan implementasi pengembangan wisata berbasis masyarakat, tentunya kita harus mengetahui lebih dalam terkait dengan potensi yang terdapat dalam masyarakat desa tersebut. Semiminal mungkin, pemetaan sosial dan pemetaan aktor yang

dapat berpengaruh, baik mendorong maupun menghambat dalam upaya pengembangan destinasi wisata yang melibatkan masyarakat secara langsung. Seperti yang pernah dilakukan dengan model pendekatan berbasis pada keterlibatan masyarakat secara langsung dalam upaya mendorong desa wisata, salah satunya dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) di Desa Wisata Pucung, Wukirsari, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (Hidayana, Kutaneegara, Setiadi, Indiyanto, Fauzanafi, Dyah F N, Sushartami & Yusuf, 2019). Leiper (1979) dan Holden (2016) juga menjelaskan upaya-upaya model seperti ini, perlu turut andil serta saling keterlibatan multisektor. Penyusunan ide-ide pengembangan suatu wisata akan berdampak pada lingkungan, geografis dan dinamika sosial sekitarnya. Hal ini menunjukkan kesinambungan yang saling berkaitan erat dalam menjaga keberadaan lingkungan, hutan dan alam terutama dalam menggandeng keterlibatan masyarakat secara langsung. Dalam upaya dukungan dan inisiatif pengembangan destinasi wisata, pemerintah daerah juga turut terlibat memfasilitasi dengan keberadaan potensi sumber daya alam yang sangat potensial tersebut.

Ketiga, peran serta pihak swasta atau pihak ketiga yang ingin mendorong pengembangan destinasi wisata sesuai kepentingan lembaga mereka. Hal ini dapat menjadi salah satu opsional terkait dengan model perencanaan pengembangan wisata yang melibatkan multi-stakeholder dalam kerangka acuan desain kegiatannya akan seperti apa. Karena, keterlibatan pihak swasta atau lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) yang bergerak pada bidang wisata atau ekowisata, pasti mempertimbangkan profit atau keuntungan baginya. Oleh karena itu, dalam pelibatan pihak swasta atau LSM/NGO yang akan mendukung rencana pengembangan destinasi wisata hutan kapur ini, penting untuk mengembangkan formulasi *Community Action Plan* (CAP) sebelum pengimplementasian destinasi wisata itu sendiri. Kerangka model pelibatan masyarakat dalam wujud *Community Action Plan* (CAP) tidak begitu sering digunakan. Hidayana, *et.al* (2019), menjawab kemungkinan potensi tersebut, karena determinasi kegiatan-kegiatan yang dianggap hanya berdampak pada lingkup masyarakat sekitar saja, padahal dampak berantai muncul karena diperhatikan secara detail atas kausalitas yang dihasilkan dari pengembangan *Community Action Plan* (CAP) seperti upaya mendorong destinasi wisata.

Dengan demikian, strategi pengembangan destinasi wisata ataupun ekowisata alam sangat penting melibatkan aktor yang berada di sekitar sumber daya alam potensial, yaitu masyarakat. Peran serta masyarakat dalam menerima maupun menolak atas inisiatif pengembangan wisata lokal, sangat dipertimbangkan oleh pemerintah setempat karena akan berkaitan dengan tingkat keamanan dan kenyamanan lokasi wisata itu sendiri. Maka dari itu, perlu semacam kolaborasi antara setiap elemen yang dapat mendukung dan mendorong akses, strategi perencanaan, implementasi serta rencana tindak lanjut dari tujuan pengembangan destinasi wisata hutan kapur Desa Sibagindar agar dapat berjalan terstruktur sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Jelas, peran pemerintah sebagai fasilitator, masyarakat sebagai aktor dan pihak swasta/LSM/NGO dapat menjadi kreatornya. Kolaborasi ini merupakan model perpaduan kerjasama yang cukup solid dan berpotensi menjadi model skema percontohan yang dapat diterapkan di daerah potensial pengembangan ekowisata di daerah lainnya.

Antara Tantangan dan Harapan dari Pengembangan Ekowisata Hutan Kayu Kapur

Terdapat beberapa tantangan yang cukup relatif perlu menyesuaikan kembali dalam menghadapi pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat, mulai dari faktor-faktor internal maupun eksternal yang berkaitan dengan ekosistem alam dan lingkungan. Jadi, terdapat banyak tantangan terkait dengan mendorong terbentuknya kesadaran masyarakat atas hadirnya inisiatif pengembangan destinasi wisata hutan kapur yang terdapat di Desa Sibagindar. Dampak dari pengembangan destinasi wisata hutan kapur ini tidak dapat langsung dirasakan dengan instan oleh masyarakat Desa Sibagindar. Akan tetapi, perlahan mulai terdapat perubahan secara habitus masyarakat, dari yang biasanya tertutup jika bertemu dengan suasana keramaian dan sudah mulai dapat menyesuaikan dengan situasi wisatawan yang datang berkunjung dengan jumlah banyak. Karena lagi-lagi, ketika hadirnya pengunjung untuk berwisata di hutan kapur Delleng Degak, berarti secara tidak langsung juga harus meninggalkan sumber penghidupan mereka di pertanian maupun perladangan. Selain juga mengemban tanggung-jawab dalam mendorong pengembangan destinasi wisata di Desa Sibagindar, terdapat beberapa dampak yang muncul akibat mendorong ekowisata hutan kapur yang mereka inisiasi. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang warga yang juga terlibat dalam pengembangan ekowisata hutan kapur, terkait dengan dampak yang dirasakan ketika wisatawan berkunjung ke wisata hutan kapur tersebut;

“Ketika ada wisatawan yang datang, mau tidak mau kami juga harus meninggalkan pekerjaan kami di ladang biasanya. Karena sudah komitmen sejak awal memulai pengembangan wisata ini, ya sudah jadi resiko untuk sering tinggalkan ladang dadakan. Tinggal kita sesuaikan kebiasaan baru saja, dari yang biasanya hanya kerja diladang, sekarang sudah harus siap untuk menemani orang-orang yang mau berwisata ke hutan kapur.” (Kutipan wawancara dengan Edi Cahaya Manik, April 2023).

Oleh sebab itu, dari pernyataan diatas terdapat beberapa keresahan bagi beberapa perwakilan peran masyarakat Desa Sibagindar, yang harus mengorbankan aktivitas sumber penghidupan mereka ketika pada situasi ini. Hal inilah yang berpotensi memicu permasalahan baru yang akan dihadapi oleh masyarakat dan menjadi tantangan bagi pengembangan destinasi wisata yang sedang dijejaki. *Pertama*, tantangan yang menjadi permasalahan yang cukup besar adalah kesadaran dan kepedulian atas potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki desa, tetapi tidak mengetahui cara mengembangkannya bagaimana. Hal ini merupakan dampak dari banyak pengaruh internal bagi masyarakat desa, karena secara akses dan pemanfaatan platform apa yang dapat digunakan untuk mendorong inisiatif pengembangan destinasi wisata alam yang tersedia. Situasi ini terjadi ketika melakukan proses identifikasi dan pemetaan potensi apa-apa saja yang akan masuk dalam fasilitas wisata yang akan dikembangkan pada Hutan Kapur Delleng Degak.

Kedua, sumber daya manusia yang masih minim pengalaman untuk mengelola suatu sektor pengembangan destinasi wisata. Jelas, faktor sumber daya manusia ini sangat begitu penting dalam upaya pengembangan wisata seperti ini, terlebih masyarakat yang dilibatkan sangat awam

dengan manajemen pengelolaan sektor wisata dan terdengar asing dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini disadari oleh masyarakat dalam upaya membangun ide pengembangan wisata, ketika pelatihan peningkatan kapasitas (*capacity building*) yang coba dilakukan oleh pemerintah desa dan berangkat dari pengalaman melakukan kunjungan wisata yang pernah dilakukan. Jadi, momentum pengalaman berwisata juga merupakan bagian dari sumber ide atas rencana pengembangan wisata hutan kapur yang akan dikembangkan ini. Apa-apa saja yang dialami ketika berwisata, memperoleh apa saja ketika berwisata dan tersedia fasilitas apa saja ketika sedang melakukan kunjungan wisata, serta kesan apa yang diperoleh ketika datang berkunjung ke lokasi wisata tersebut. Dari kesan dan pengalaman tersebutlah yang akhirnya, memunculkan ide untuk mengembangkan model wisata yang seperti apa, sehingga hal-hal terkait pengalaman berwisata dapat didapatkan oleh para calon pengunjung wisata hutan kapur tersebut.

Tantangan *ketiga* yang dihadapi oleh masyarakat Desa Sibagindar dalam proses perencanaan pengembangan destinasi wisata hutan kapur ini adalah modal sosial (*social capital*). Selain karena faktor kesadaran masyarakat atas kekayaan potensi sumber daya alam yang belum tau mengoptimalkannya dan faktor kesiapan sumber daya manusia yang awam kemampuan dan kapasitas mengelola wisata, yaitu kuatnya modal sosial yang terbangun. Modal sosial tidak hanya sebatas materiel saja, akan tetapi juga relasi antar pihak yang memiliki visi berkembang bersama untuk mewujudkan pengembangan destinasi wisata tersebut. Hal ini menjadi langkah yang sangat terbatas untuk menaikkan pamor dari tujuan pengembangan wisata hutan kapur yang tengah didorong oleh masyarakat. Karena upaya mendorong berkembangnya suatu wisata, diperlukan kesiapan modal sosial yang akan menjadi rantai keberlanjutan terimplementasinya cita-cita ekowisata yang dibangun, terutama berangkat dari pelibatan masyarakat secara langsung. Jadi, ketidaksiapan akan terbangunnya modal sosial dan relasi yang terbangun dengan baik. Menjadi runtutan masalah yang hadir ketika ingin mendorong pengembangan wisata tersebut, baik dengan pemerintah daerah setempat maupun pihak swasta yang konsentrasi pada sektor pengembangan suatu wisata.

Dan *keempat*, tantangan terkait dengan kesiapan akses wisata dan manajemen *branding* destinasi wisata hutan kapur yang akan dikenalkan ke hadapan publik. Masalah ini dihadapi ketika upaya perencanaan pengembangan wisata dianggap menjadi alternatif pendorong pengenalan nama Pakpak Bharat diketahui banyak orang. Secara pendekatan membangun branding destinasi wisata, model seperti ini disebut sebagai pola kesisteman dari pengelolaan pariwisata. Hal ini sejalan dengan apa yang ditawarkan oleh Ridwan (2012) bahwa kesisteman dalam mengelola destinasi wisata bukan hanya sekedar penyediaan fasilitas, akan tetapi lebih pada alur perencanaan dan apa yang akan diperoleh wisatawan atau pengunjung ketika berwisata ke hutan kapur tersebut, salah satunya adalah kesan dan memori. Preferensi tujuan orang-orang hendak melakukan kunjungan wisata, bukan hanya sekedar menjadi daftar tempat wisata yang sudah pernah dikunjungi. Hal ini menjadikan tantangan baru bagi masyarakat dalam mengenalkan wisata hutan kapur di Desa Sibagindar, dimana memantik kesensitifan atas model apa yang akan

diterapkan ketika ingin mengembangkan suatu wisata, baik berupa produk-produk wisata maupun menawarkan kesan dari destinasi wisata yang disediakan.

Dari beberapa permasalahan yang muncul diatas, secara bersamaan ternyata juga menciptakan harapan-harapan bagi masyarakat Desa Sibagindar dalam menjaga keberadaan hutan dalam balutan ekowisata tersebut. Mula-mula berangkat dari konsekuensi dari keberanian dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan objek wisata yang diharapkan dapat (1) merubah pola pikir masyarakat. Hal ini didorong dengan keinginan masyarakat untuk dapat dikenal oleh orang-orang lain, bahwa keberadaan hutan kapur desa mereka merupakan suatu hal yang perlu diketahui banyak orang, baik dalam agenda berkunjung dan berwisata maupun dijadikan lokasi riset-riset ilmiah yang bertujuan mengangkat potensial alami hutan kapur sendiri. Kemudian, terdapat ekspektasi dari dampak inisiatif pengembangan wisata yang dialami mulai sejak pengusahaan awal mendorong objek wisata, hingga (2) memperoleh imbal positif yang didapatkan masyarakat karena sudah berupaya menjaga ekosistem alam yang masih terjaga alami hingga sekarang. Salah satu contohnya adalah saling berinteraksinya masyarakat Desa Sibagindar dengan orang dari luar yang memiliki latar belakang narasi berwisata yang berbeda-beda.

Dengan keingin bersama-sama dalam menjaga keberadaan hutan kapur dan tetap lestari sesuai keadaan alam yang semestinya, (3) peningkatan kapasitas dalam mengelola hutan kapur yang menjadi wisata alam menjadi semakin baik. Tujuannya begitu jelas, karena inisiatif masyarakat untuk pengembangan wisata hutan kapur ini menjadi sebuah bentuk taruhan. Masyarakat berupaya menjaga hutan agar tidak ditambah dan tidak dieksploitasi dengan mengklaim status pengelolaan hutan dalam skema Hutan Desa (HD) pada gaungan besar izin perhutanan sosial, akan tetapi keberadaan wisata hutan kapur seakan-akan mengorbankan alam dan hutan untuk kepentingan sektor rekreasi atau berwisata semata. Jadi, perlu pemahaman dan kemampuan dalam mengelola objek wisata hutan kapur yang berada di level pengorganisasian desa untuk menciptakan masyarakat sebagai pengelola wisata yang berkapasitas pada bidang wisata tersebut. Harapan terpenting bagi masyarakat Desa Sibagindar sendiri ialah, (4) terciptanya pemahaman yang berkelanjutan dari pelestarian dengan menjaga keberadaan dan cerita hutan kapur yang cukup melegenda di Kabupaten Pakpak Bharat. Dorongan ini menjadi cara untuk menumbuhkan sense of belonging atas keberadaan hutan kapur yang tidak semua tempat memilikinya dan hal tersebut menjadi kekayaan alam yang dianggap sebagai warisan leluhur serta harus dilestarikan hingga generasi berikutnya.

Kesimpulan

Wisata hutan kapur Delleng Degak merupakan satu dari sekian ekowisata yang berada di Kabupaten Pakpak Bharat. Selain kekayaan tradisi leluhur peradatan khas masyarakat yang dimiliki marga (Pakpak), tetapi keberadaan hutan dan kekayaan alamnya yang menjadikan hutan kapur ini lebih istimewa. Salah satunya adalah keterlibatan peran-serta masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan, hutan dan alamnya. Tujuannya yakni mengupayakan pelestarian warisan leluhur mereka dalam wujud destinasi wisata yang dapat mengedukasi banyak

pengunjung, mapun pusat-pusat penelitian untuk meneliti lebih mendalam terkait jenis tanaman pohon kapur yang berada di Desa Sibagindar, Kabupaten Pakpak Bharat. Dinamika yang terjadi dalam upaya membangun bersama pelestarian nilai-nilai leluhur mereka lewat keberlanjutan hutan kapur sendiri merupakan suatu aksi heroik, karena tetap ingin menjaga kekayaan alam selain menjadi sumber penghidupan selama ini. Inisiatif mengembangkan kawasan hutan belantara itu sendiri, bukan berarti semata-mata hanya untuk mengeksploitasi hasil hutan saja, akan tetapi menjadi upaya kepedulian masyarakat Lebbuh Manik Perlambuken dalam melestarikan jenis tanaman purba yang sudah sangat langka yang masih tersisa di tanah leluhur mereka. Model kesadaran atas menjaga warisan leluhur yang dilakukan oleh masyarakat Lebbuh Manik Perlambuken ini merupakan salah satu cara menghargai leluhur mereka.

Dari penelitian ini, terlihat upaya-upaya pengembangan wisata tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya. Akan tetapi melalui pengupayaan, strategi dan pelibatan multisektor yang dilakukan oleh berbagai *stakeholder*. Dalam hal ini, tidak hanya dapat diperankan oleh masyarakat saja, namun kolaborasi antar setiap pihak-pihak yang menginginkan keberlanjutan hutan kapur agar tetap terjaga. Peran-peran kunci dalam memahami pengembangan wisata alam yang berada di Desa Sibagindar, tidak hanya masyarakat dan desa saja, akan tetapi juga berkaitan dukungan dari pemerintah daerah maupun pihak swasta yang bergerak dibidang lingkungan. Upaya pengembangan ekowisata hutan kapur telah diinisiasi oleh masyarakat yang terlibat secara langsung, namun sayangnya kemampuan dalam pengelolaan wisata alam yang terstruktur belum dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai pengelola serta kesisteman manajemen wisata yang baik dan profesional. Selain keberadaan destinasi ekowisata hutan kapur diketahui banyak orang yang ingin berwisata dengan kesan, pengalaman, edukasi, kultur lokal dan sajian kearifan lokal lainnya. Namun, juga perlu penguatan kapasitas dan manajemen pengelolaan wisata yang berbasis masyarakat secara berkelanjutan, sehingga akan mencapai kesiapan dan kemandirian pengelola dari tujuan awal pengembangan Wisata Hutan Kapur *Delleng Degak*, Desa Sibagindar.

Daftar Pustaka

- Brown, David & Stange, Jennifer. (2015). *Tourism Destination Management*. Washington University.
- Buckley, Ralf. (2011). *Tourism and Environment*. Annual Review of Environment and Resources.
- Buhalis, Dimitros. (2000). Marketing The Competitive Destination of The Future. *Journal of Tourism Management*, 21 (1), 97-116.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches (3rd Edition)*. Los Angeles. SAGE Publication.
- Database Peraturan, JDIH BPK. (2016). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Sumber:

- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163479/permen-lhk-no-83-tahun-2016>, diakses pada 28 Maret 2024, 16.10 WIB.
- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pakpak Bharat. (2022). Bupati Pakpak Bharat Kunjungi Kawasan Pelestarian Hutan Kapur. Sumber: <https://www.pakpakhartkab.go.id/v1/berita/2022-07-03/bupati-pakpak-bharat-kunjungi-kawasan-pelestarian-hutan-kapur>, diakses pada 29 Maret 2024, 21.07 WIB.
- Genthong, Aryo Wisanggeni. (2009). *Motivasi Pengukir Asmat mulai Bergeser? dalam Ekspedisi Tanah Papua, Terasing di Tanah Sendiri*. Jakarta: Laporan Jurnalistik KOMPAS.
- Hamidah, Siti. (2019). Produk Pariwisata Berbasis Ekologi di Ha Long Bay, Vietnam. *JKI: Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 13 (1), 31-42.
- Hancock, B., Ockleford, E., & Windridge, K. (2009). *An Introduction to Qualitative Research*, National Institute for Health Research (NIHR). The NIHR RDS EM/YH.
- Holden, A. (2016). *Environment and Tourism 3rd Edition*. Routledge: New York.
- Hudayana, Bambang., Kutanegara, Pande Made., Setiadi., Indiyanto, Agus., Fauzanafi, M Zamzam., Dyah FN, Mubarika., Yusuf, Mohamad & Sushartami, Wiwik. (2019). Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Padukuhan Pucung, Wukirsari, Bantul. *Jurnal Bakti Budaya*, 2 (2), 99-112.
- Kartodirdjo, H., Murti Laksono, K., Pasaribu, H S., Subandi, U dan Nuryartono, N. (2000). *Kajian Institusi Pengelolaan DAS dan Konservasi Tanah*. Bogor: Koperasi Sodaliti.
- Kostermans, A.J.G.H. (1988). *Dryobalanops Sumatrensis*, comb. nov. The Correct name for *Dryobalanops Aromatica*. Biotrop and Herbarium Bogoriense, Bogor, Indonesia. *Blumea*, 33 (2), 343-346.
- Kurniawan, Akbar Rizqi. (2020). Tantangan Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat pada Era Digital di Indonesia (Studi Kasus Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Pangalengan). *TORNARE: Journal of Sustainable Tourism Research*, 3 (1), 1-10.
- Leiper, N. (1979). The Framework of Tourism: Towards a Definition of Tourism, tourist, and the Tourist Industry. *Annals of Tourism Research*, 6 (4), 390-407. [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(79\)90003-3](https://doi.org/10.1016/0160-7383(79)90003-3)
- Liputan Medan Pos Online. (2024). Tim Explore IFTA Kunjungi Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat. <https://www.medanposonline.com/sumatera-utara/1861/team-explore-ifta-kunjungi-wilayah-pakpak-bharat/> diakses pada 24 Maret 2024, 21.39 WIB.
- Purnamasari, Andi Maya. (2011). Pengembangan Masyarakat Untuk Pariwisata di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 22 (1), 49-64.

- Resdiana, Enza & Sari, Tita Tanjung. (2019). Penguatan Peran Triple Helix dalam Pariwisata Segitiga Emas di Pulau Gili Labak Madura. *Journal of Governance Innovation*, 1 (2), 1-16.
- Ridwan, Mohammad. (2012). *Perencanaan Pariwisata dan Pengembangan Pariwisata*. Medan Polonia: PT. SOFMEDIA.
- Ross, S., & Wall, G. (1999). Ecotourism: Towards Congruence between Theory and Practice. *Tourism Management*, 20 (1), 123-132. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(98\)00098-3](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00098-3)
- Samosir, Restu., Siagian, Albiner., Firmando, Harisan B., Silalahi, Mery dan Sitepu, Yulia K S. (2023). Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata di Desa Prongil Julu Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat. *Jurnal Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*, 1 (4), 148-158.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 Ha (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh) Hektar. Sumber: https://kukuh.menlhk.go.id/kawasan_hutan, diakses pada 28 Maret 2024, 13.29 WIB.
- Suryadhani, A Rizqi., Prayitno, Gunawan, & Surjono. (2023). Relationship of Social Capital and Collective Action in The Development of Tourism Village. *Prosperity: Journal of Society and Empowerment*, 3 (1), 1-18.